



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BANK INDONESIA (BI)
UNIT KERJA : KPW PROVINSI SUMATERA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMAD IRFAN SUKARNA
2. Jabatan : DEPUTI KEPALA PERWAKILAN
3. NHK : 409107

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 9.740.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/140 m² di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, WARISAN Rp. 2.100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 168 m²/81 m² di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m²/156 m² di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 2.700.000.000
4. Tanah Seluas 280 m² di KAB / KOTA BANDUNG, WARISAN Rp. 850.000.000
5. Tanah Seluas 664 m² di KAB / KOTA BANDUNG, WARISAN Rp. 900.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m²/30 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 390.000.000
7. Tanah Seluas 572 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 710.000.000

1. MOBIL, HONDA BR-V Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 285.000.000
2. MOBIL, HONDA CIVIC TURBO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----



D. SURAT BERHARGA	Rp.	2.937.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	8.608.244.319
F. HARTA LAINNYA	Rp.	290.000.000
Sub Total	Rp.	22.285.244.319
III. HUTANG	Rp.	134.670.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	22.150.574.319

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.